PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TERHADAP PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN SEBAGAI OBJEK PRA-PERADILAN

OLEH

RAHMIYATI HADJARATI

NIM : 271 413 191

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. FENTY PULUHULAWA, SH., M.Hum	**Hj.NIRWAN JUNUS, SH.,MH**
NIP. 196804009199303 2001	**NIP. 196906022000032001**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH

NIP. 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TERHADAP PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN SEBAGAI OBJEK PRA-PERADILAN

OLEH :

RAHMIYATI HADJARATI

NIM: 271413191

Telah Diperiksa Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari Tanggal: Kamis. 26 Juli 2018

Pukul: 10.00 WITA

1. **Dr. FENCE M WANTU, SH., MH** (.....)
   Nip. 197401192001121001
2. **Hj. MUTIA CH. THALIB, SH., M.Hum.** (.....)
   Nip. 196907041998022001
3. **Prof Dr. FENTY U. PULUHULAWA, SH., M.Hum** (.....)
   Nip. 196804091993032001
4. **Hj. NIRWAN JUNUS, SH.,MH** (.....)
   Nip. 196906022000032001

Gorontalo, Juli 2018

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

MOHAMAD RUSDIYANTO U PULUHULAWA, SH.M.Hum

NIP: 197011051997031001

ABSTRAK

Rahmiyati Hadjarati, NIM : (271413191) 2018. "Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Terhadap Penggeledahan Dan Penyitaan Sebagai Objek Preperadilan ". Di bombing oleh masing-masing Pembimbing I : Prof. Dr. Fenty U Puluhulawa, SH.,MHum dan Pembimbing II : Hj. Nirwan Junus, SH.,MH. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, universitas Negeri Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum jika terjadi penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah. Serta untuk mengetahui dan menganalisis objek dari penggeledahan dan penyitaan dalam Perma No 4 tahun 2016.

Jenis peneletian ini menggunakan penelitian Normatif yaitu yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum, agar dapat mendapat jawaban dari penelitian yang dilakukan.

Adapun hasil penelitian yang di peroleh penulis dalam melakukan penelitian ini, meliputi implikasi hukum dari akibat penyitaan dan penggeledahan yang tidak sah, maka salah satu pihak mengajukan praperadilan untuk memperoleh hak asasinya yang dirampas. Selanjutnya yang menjadi objek penggeledahan dan penyitaaan berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2016 adalah benda bergerak dan tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, menjadi objek dari penyitaan. Hal ini juga sesuai dengan yang telah di amanahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dengan demikian dapat di simpulkan bahwa ketika terjadi penggeledahan dan Penyitaan yang di lakukan tanpa prosedur yang berlaku maka salah satu pihak yang merasa telah di rampas dan di langgar hak asasinya dapat mengajukan pra pradilan selanjutnya yang menjadi objek penyitaan adalah benda bergerak dan yang tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Kata kunci : Implikasi, Putusan MA, Penggedahan dan Penyitaan

ABSTRACT

Hadjarati, Rahmiyati. Student ID: (271 413 191) 2018. "The Implication of Supreme Court Regulation No. 4 of 2016 on Search and Seizures as Pre-trial Objects." Principal Supervisor: Prof. Dr. Fenty U Puluhulawa, SH. , M. Hum. Co-supervisor: Hj. Nirwan Junus, SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo.

This study aims to determine and analyze the legal implications of unlawful rummage and seizures. As well as to know and analyze the Objects of search and seizure in Perma NO 4 of 2016

This normative research is a research on legal principles, research on legal systematic, research on the level of legal synchronization, legal history research and comparative law study, in order to get answers to research conducted.

The results of research obtained in conducting this study, including the legal implications of the consequences of seizure and unlawful search, and therefore one of the parties filed a pretrial to obtain the deprived human rights. Furthermore, the object of search and seizure based on PERMA No. 4 Year 2016 is a moving and immovable object both tangible and intangible, being the object of seizure. This is also in accordance with what has been mandated in the Civil Procedure Code.

Thus, it concludes when a search and seizure are conducted without the applicable procedure accordingly one of the parties who feel deprived and violated their human rights may file a further pre-trial which becomes the object of seizure is a moving and immovable object either tangible or intangible .

Keywords: Implication, Supreme Court Decision, Search, Seizure.

TRANSBAHASA
SK
MENTERI HUKUM & HAM RI
NO. AHU-0005641.AH.01.07.2017
IDEAS IN TRANSLATION